Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Komoditas Kelapa Sawit dengan Sistem Keberkelanjutan di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS

Erfain
Universitas Sulawesi Tenggara
erfain79@gmail.com

St. Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
St.Jawiah@gmail.com

Abdul Nashar
Universitas Sulawesi Tenggara
AbdulNashar@gmail.com

Haeruddin
Universitas Sulawesi Tenggara
Haeruddin@gmai.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Erfain, Jawiah, St., Nashar, A., & Haeruddin. (2025). Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Komoditas Kelapa Sawit dengan Sistem Keberkelanjutan di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5* (3),4965-4971.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan terkait sinkronisasi kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan komoditas kelapa sawit berbasis sistem keberlanjutan di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Fokus penelitian mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna, pembentukan kelompok masyarakat giat perkebunan sawit, implementasi program pemerataan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan yang diiringi dengan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang tepat dapat meningkatkan kapasitas petani, memperkuat kelembagaan, memperluas akses modal, mendorong diversifikasi usaha, serta menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci: Sosialisasi, Edukasi, Kebijakan Desa, Kelapa Sawit, kebijakan Keberlanjutan

Abstract

This study aims to examine the synchronization of village government policies to enhance oil palm commodities based on a sustainability system in Puao Village, Angata District, South Konawe Regency. The research focuses on human resource development, strengthening group institutions, community capital enhancement, productive business development, provision of appropriate information, formation of active oil palm plantation community groups, implementation of equity-oriented programs, and optimization of plantation land utilization. The study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model. The findings indicate that policy synchronization accompanied by appropriate socialization, education, and dissemination can enhance farmers' capacity, strengthen institutional structures, expand access to capital, encourage business diversification, and uphold environmental, social, and economic sustainability principles.

Keywords: Socialization, Education, Village Policy, Oil Palm, Sustainability Policy

A. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki peran yang strategis dalam mengelola potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di wilayahnya. Salah satu komoditas unggulan yang berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe Selatan, adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit bukan hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi penopang perekonomian desa melalui perputaran ekonomi lokal yang cukup signifikan. Namun demikian, pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola yang berkelanjutan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah terutama di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Desa Puao, Kecamatan Angata. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Namun demikian, pengembangan kelapa sawit di tingkat desa bukan tanpa tantangan. Berbagai permasalahan mulai dari keterbatasan akses informasi, kurangnya pengetahuan tentang teknik budidaya yang baik dan ramah lingkungan, hingga permasalahan terkait regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi, kerap menjadi hambatan dalam mendorong peningkatan produksi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah mempunyai peran strategis dalam mensinergikan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan kelapa sawit. Sinkronisasi kebijakan ini sangat dibutuhkan agar setiap program dan langkah yang diambil tidak tumpang tindih, melainkan saling mendukung dan memenuhi prinsip keberlanjutan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Mengingat keberlanjutan menjadi tuntutan global, pengembangan kelapa sawit di Desa Puao harus mengedepankan sistem yang mampu menjaga kelangsungan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, komoditas kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Perkembangan sektor ini membawa dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan petani, terbukanya lapangan kerja, serta tumbuhnya berbagai usaha turunan di bidang perdagangan dan jasa. Akan tetapi, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memastikan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). Tantangan tersebut meliputi aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola kelembagaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya yang sistematis melalui sosialisasi, edukasi, dan publikasi dalam rangka menyelaraskan (sinkronisasi) kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Sosialisasi, edukasi, dan publikasi merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan tersebut. Sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen

masyarakat memahami isi dan tujuan kebijakan yang berlaku, sehingga tercipta kesadaran kolektif dan dukungan luas dalam pelaksanaannya. Edukasi atau pembelajaran memberikan peningkatan kapasitas dan pengetahuan teknis bagi para petani dan pemangku kepentingan lainnya agar mampu menerapkan praktik-praktik pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, publikasi berfungsi sebagai media penyebaran informasi yang efektif untuk menjangkau berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, swasta, akademisi, serta masyarakat luas, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan komoditas ini.

Sinkronisasi kebijakan yang dimaksud tidak hanya sebatas pengharmonisasian aturan tertulis, tetapi juga mencakup penyesuaian program dan kegiatan antar berbagai tingkatan pemerintahan dan institusi yang terlibat. Dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Desa Puao yang khas, sangat diperlukan pendekatan multi-stakeholder dan kolaborasi intensif. Hal ini agar kebijakan yang diterapkan dapat menyentuh akar permasalahan sekaligus mengefektifkan tata kelola kelapa sawit berbasis keberlanjutan.

Di sisi lain, pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional maupun internasional, seperti Sustainable Development Goals (SDGs), di mana komoditas ini menjadi salah satu fokus utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Melalui sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang mendukung sinkronisasi kebijakan, Desa Puao dapat menjadi model pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam.

Demikian pula, penerapan sistem keberlanjutan dalam pengelolaan kelapa sawit di Desa Puao diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif bagi generasi mendatang. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mendorong Desa Puao sebagai daerah otonom yang mandiri dan berdaya saing, serta berkontribusi pada penguatan sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.

Peningkatan komoditas kelapa sawit melalui pendekatan keberlanjutan sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Program sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang mengarah pada sinkronisasi kebijakan di pemerintah desa merupakan salah satu cara yang efektif dalam mendorong terciptanya tata kelola kelapa sawit yang optimal. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produksi dan kualitas komoditas, tetapi juga mengurangi potensi konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketidaktepatan pelaksanaan kebijakan yang selama ini menjadi kendala.

Melalui pendampingan yang terus menerus dan kolaborasi antara berbagai pihak, Desa Puao dapat menjadi contoh dalam penerapan sistem kelapa sawit berkelanjutan yang membawa manfaat lebih luas bagi pembangunan desa dan daerah. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Konawe Selatan dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan yang modern, ramah lingkungan, dan berwawasan masa depan.

B. Metodologi

Adapun tahapan atau langkah-langkah secara konkrit dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra, sesuai dengan tema yang di fokuskan terkait sosialisasi, edukasi dan publikasi terhadap singkronisasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan komoditas kelapa sawit melalui sistem keberkelanjutan di desa Puao, kecamatan Angata, kabupaten Konawe Selatan (Konsel), diantaranya:

a. Koordinasi dan Pelatihan: koordinasi dan pelatihan tentunya sangat diperlukan agar memberikan kemudahan dalam melakukan kerjasama bersama pemerintah desa dalam merancang, mengorganisir, dan mengelola kebijakan peningkatan komoditas kelapa sawit melalui sistem keberkelanjutan di desa Puao, kecamatan Angata.
b. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan: setelah melakukan koordinasi dan pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah sosialisasi dan implementasi kebijkan di desa Puao, dengan tujuan untuk menciptkan sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.
c. Pendampingan dan Evaluasi Kebijakan: Terciptanya program pemerintah desa yang bersifat pemerataan dalam memberikan penyediaan pohon bibit sawit terhadap masyarakat melalui sistem keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial antara warga, tercipta rasa berkeadilan, pemanfaatan lahan secara optimal, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi warga.

d. Monitoring Keberlanjutan Program: Untuk memastikan proses efektifitas implementasi kebijakan antar pemerintah desa dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Partisipasi Mitra: Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini yaitu menyiapkan peserta (masyarakat desa), sarana dan prasarana, LCD, layar untuk LCD, sound system, karpet dll. Upaya keberlanjutan program pengabdian masyarakat ini diwujudkan dengan menjadikan mitra sebagai binaan dalam bidang sosialisasi, edukasi dan publikasi terhadap singkronisasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan komoditas kelapa sawit melalui sistem keberkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Koordinasi dan Pelatihan

Koordinasi merupakan aktivitas penting yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Di Desa Puao, koordinasi antara pemerintah desa, kelompok tani, dinas pertanian, perusahaan kelapa sawit, dan pendamping teknis harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan agar tercipta sinergi yang efektif. Koordinasi ini mencakup penjadwalan kegiatan, pembagian peran dan fungsi, serta penyelarasan target dan indikator keberhasilan.

Pelatihan adalah sarana utama dalam membangun kapasitas SDM desa. Petani kelapa sawit dan pendamping harus diberikan pelatihan teknis dan non-teknis terkait praktik budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan sesuai standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Pelatihan meliputi teknik pemupukan yang tepat, pengendalian hama terpadu, konservasi lahan dan air, serta praktik pertanian berkelanjutan. Selain aspek teknik, pelatihan juga mencakup manajemen usaha tani, pencatatan administrasi, serta pelatihan sosialisasi kebijakan agar petani paham dengan isi dan tujuan kebijakan.

Koordinasi yang baik dan pelatihan yang efektif akan menciptakan pemahaman bersama yang kuat, sehingga kebijakan berhasil disinkronkan dengan praktek di lapangan. Dengan demikian, produktivitas dan kualitas hasil kelapa sawit dapat meningkat tanpa merusak lingkungan sekitar, mendukung konservasi sumber daya alam, dan memperkuat keberlanjutan usaha tani sawit di Desa Puao.

b. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan merupakan langkah awal menanamkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peraturan dan standar baru, terutama yang terkait dengan prinsip kelapa sawit berkelanjutan. Di Desa Puao, pemerintah desa berperan sebagai agen utama dalam menyampaikan informasi dan edukasi kebijakan kepada masyarakat desa, melalui berbagai media dan metode seperti pertemuan desa, penyebaran poster, penyuluhan langsung, serta media digital.

Sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok tani kelapa sawit, agar kebijakan yang dirancang dapat diterima dan diimplementasikan secara benar. Keterlibatan partisipatif penting untuk menghindari miskomunikasi dan resistensi terhadap kebijakan baru yang mungkin dirasa memberatkan.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh regulasi desa yang jelas dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk, pengendalian hama, serta mekanisme kemitraan inti-plasma diterapkan secara konsisten. Dalam pelaksanaan, pelibatan aparat desa, penyuluh pertanian, dan pendamping kelapa sawit penting untuk membantu petani mengadopsi standar keberlanjutan yang disyaratkan.

Sosialisasi dan implementasi yang terintegrasi akan memperkuat fondasi pengelolaan kelapa sawit yang produktif dan ramah lingkungan. Hal ini menciptakan kondisi di mana kebijakan tidak hanya berupa dokumen, melainkan juga menjadi pedoman hidup sehari-hari yang membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Puao.

c. Pendampingan dan Evaluasi Kebijakan

Pendampingan merupakan tahap penting untuk menjembatani gap antara kebijakan tertulis dengan realita di lapangan. Pendamping kelapa sawit berperan sebagai fasilitator yang membantu petani mengaplikasikan prinsip keberlanjutan, termasuk aspek teknis maupun administratif seperti pencatatan hasil panen, pengelolaan keuangan usaha tani, serta persiapan sertifikasi ISPO.

Pendampingan ini juga memperkuat komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah desa. Melalui pendampingan, masalah yang dihadapi petani dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama. Hal penting lainnya adalah pendampingan dalam proses sertifikasi yang membantu petani mendapatkan pengakuan formal atas usaha kelapa sawit berkelanjutan mereka, yang pada gilirannya membuka akses pasar dengan harga lebih baik.

Evaluasi kebijakan dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap peningkatan produktivitas, kepatuhan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Metode evaluasi meliputi survei lapangan, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, serta forum diskusi antara pemerintah desa dan kelompok tani. Hasil evaluasi menjadi feedback strategis untuk penyesuaian kebijakan agar terus relevan dan optimal.

Dengan pendampingan intensif dan evaluasi berkala, kebijakan sawit berkelanjutan di Desa Puao dapat mengalami perbaikan berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan.

d. Monitoring Keberlanjutan Program

Monitoring keberlanjutan merupakan tahap akhir yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan dan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Monitoring di Desa Puao harus didesain secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, kelompok tani, pendamping, dan juga lembaga eksternal.

Indikator monitoring meliputi kualitas hasil panen, penggunaan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak sosial seperti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dapat dimaksimalkan untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data monitoring, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat.

Monitoring tidak hanya bersifat evaluatif, melainkan juga bersifat edukatif dan korektif. Temuan monitoring harus segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan atau penguatan kebijakan dan program. Dengan monitoring yang efektif, keberlanjutan program dapat dijamin serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola kelapa sawit di tingkat desa.

Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan dan komitmen berkelanjutan untuk melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan berkelanjutan juga diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan kelapa sawit di Desa Puao. Diskusi juga menyoroti perlunya publikasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan media yang dekat dengan masyarakat desa sehingga informasi tidak hanya monopoli oleh pejabat desa atau pihak tertentu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah mejelaskan Usaha pemerintah untuk menjadikan komoditas kelapa sawit menjadi komoditas yang dapat mendorong peningkatan ekonomi nasional harus di dukung oleh seluruh pihak terkait termasuk diantaranya perangkat daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri menyadari bahwa selama menjadi komoditas nasional, banyak aturan aturan terkait perkebunan kelapa sawit yang masih tumpang tindih dan kurang implementatif di tingkat akar rumput. Untuk itu pemerintah melakukan upaya penyelarasan aturan melalui panduan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, Akhmad Rifky Setya Anugrah (2023).

Lanjut, penelitian Ngadi dan Mita Noveria (2017) Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indo nesia telah memberikan dampak positif dan nega tif bagi masyarakat. Dari aspek ketenagakerjaan, pengembangan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja pada 2014. pengembangan kelapa sawit di beberapa kawasan justru berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan adalah rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, terjadinya konflik lahan, dan rendahnya akses terhadap lahan garapan sebagaimana terjadi pada petani plasma PTPN VII. Praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan juga dapat menimbulkan besarnya beban utang petani. Oleh sebab itu, pengembangan perkebunan di daerah perbatasan dan daerah lain di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan.

Temuan Cak Nuril (2023) Mengsukseskan Program Sawit Berkelanjutan ISPO RSPO. Menegaskan bahwa Desa memiliki peran yang besar dan signifikan dalam penentuan arah pembangunan Indonesia, pencapaian pembangunan berkelanjutan salah satu diantaranya adalah mendorong percepatan implementasi sawit berkelanjutan. Mengapa ini penting sebab kampanye hitam yang ahir-ahir ini sering di dengungkan kepada kelapa sawit Indonesia yang katanya

menjadi penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan menjadi sebuah ancaman yang serius. Sebab tidak dapat kita pungkiri mayoritas masyarakat kita menggantungkan hidup mereka kepada kelapa sawit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2024) dalam mengintegrasikan kebijakan tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (SANAS KSB) Tahun 2025-2029. Lalu, terkait kelembagaan yang menangani sektor kelapa sawit, pada 2015 Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Komite Pengarah yang terdiri dari delapan kementerian dan menjadi wadah merumuskan kebijakan terkait industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir.

Pemerintah desa di Desa Puao, Kecamatan Angata, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan komoditas kelapa sawit dengan menerapkan prinsip sistem keberlanjutan. Keseriusan ini terlihat dari upaya pemerintah desa dalam melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kelompok tani, dinas pertanian, hingga perusahaan kelapa sawit. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, pemerintah desa memastikan bahwa para petani tidak hanya produktif, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap tahap budidaya kelapa sawit. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas hasil dan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah desa juga menempatkan transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai prioritas dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Melalui sosialisasi aktif dan publikasi yang luas, masyarakat desa diberi akses informasi tentang tata kelola kelapa sawit yang baik dan standar keberlanjutan yang harus dipatuhi, seperti sertifikasi ISPO. Monitoring dan evaluasi secara kontinu juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan dampak positif yang nyata. Dengan pendekatan sistematis dan holistik ini, pemerintah desa menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak terkait.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang efektif berperan penting dalam sinkronisasi kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan komoditas kelapa sawit dengan sistem keberlanjutan di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Melalui koordinasi dan pelatihan yang terorganisir, kapasitas petani dan pemangku kepentingan meningkat sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih optimal. Sosialisasi dan implementasi kebijakan yang terstruktur mampu membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan praktik budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan. Pendampingan dan evaluasi kebijakan memberikan dukungan praktis sekaligus umpan balik yang penting untuk pengawasan dan penyempurnaan kebijakan. Selain itu, monitoring keberlanjutan program memastikan keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan di tingkat desa.

E. Referensi

Anugrah, A. R. S. (2023). Sinkronisasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(3), 319-328. P-ISSN 1978-0680-, e-ISSN 2655-5204

Cahyadi, E. R., Yutika, F., & Mulyati, H. (2021). Understanding oil palm smallholders' behavioral intention on sustainable production practices. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, *12*(2), 81-88.

Dharmawan, A. H., Mardiyaningsih, D. I., Rahmadian, F., Yulian, B. E., Komarudin, H., Pacheco, P., ... & Amalia, R. (2021). The agrarian, structural and cultural constraints of smallholders' readiness for sustainability standards implementation: the case of Indonesian Sustainable Palm Oil in East Kalimantan. *Sustainability*, *13*(5), 2611.

Efriani, E., Utami, D., & Dewantara, J. A. (2020). Sosialiasi Sustainable Palm Oil Pada Petani Sawit Mandiri. *JCES (Journal of Character Education Society)*, *3*(2), 246-257.

Helviani, H., & Juliatmaja, A. W. (2023). Penyuluhan terhadap petani swadaya kelapa sawit guna peningkatan ekonomi masyarakat desa Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 32-37.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2024) pada Siaran Pers terkait Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit yang Berkelanjutan. HM.4.6/345/SET.M.EKON.3/10/2024. Jakarta, 2 Oktober 2024.

Ngadi, N., & Noveria, M. (2017). Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. *Masyarakat Indonesia*, *43*(1), 95-111.

Nuril, C. (2023) Mengsukseskan Program Sawit Berkelanjutan ISPO RSPO.